



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

**TAHUN ANGGARAN
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPRD Kabupaten Barito Kuala disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Organisasi Perangkat Daerah selama Tahun 2023, sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan.

Sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Hasil pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.

Marabahan, 26 April 2024

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala



Dahtiar Fajar, S.STP,M.Si
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19760519 199703 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target > 100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang diperjanjikan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 Alhamdulillah mengalami kenaikan dari target sebesar Rp. 26.247.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.958.584.232,- atau 110,34% mengalami kenaikan sebesar 12,00 % dibanding tahun sebelumnya Tahun 2022 target sebesar Rp. 25.742.759.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.378.077.563,- atau 98,58 % keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk peningkatan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan LKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala 2023

retribusi daerah yaitu melakukan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah, melakukan monitoring dan evaluasi ke kecamatan dalam rangka penyamaan persepsi kepada aparat desa terkait capaian PBB P2, uji petik pada objek pajak restoran dan upaya-upaya lainnya yang terus dilakukan untuk peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Secara rinci Pencapaian Target Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Kinerja Nilai Penerimaan Pajak Daerah mencapai 110,34%
2. Realisasi Kinerja Nilai Penerimaan Retribusi Daerah mencapai 65,47%
3. Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Utama. Rata-rata capaian meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 110,33 %.
4. Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan target akhir Renstra adalah sebagai berikut :
 - a. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Lainnya Tahun 2023, yang terdiri dari Pajak Hotel/Penginapan, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Jasa Boga / Katering, Pajak Reklame / Bill Board/Videotron dll, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra telah mencapai 114,43 %.
 - b. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Tahun 2023, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 95,95 %, telah melampaui target akhir Renstra.
 - c. Capaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2023, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra telah mencapai 108,35%.
5. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, apabila dibandingkan dengan rata-rata target akhir renstra telah mencapai 110,33 %.

6. Penyerapan anggaran Belanja Langsung APBD Kabupaten Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp. 2.374.148.443,- (95,36%), Sedangkan realisasi Belanja Tidak Langsung adalah Rp. 3.746.462.376,- (87,99%) sehingga total realisasi keuangan APBD Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 adalah Rp. 6.120.610.810,- (90,71%).
7. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 adalah **Efektif**.
8. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah **Sangat Efisien**.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi.	1
1.3. Fungsi Strategis.	4
1.4. Isu Strategis Organisasi.	4
1.5. Landasan Hukum.	6
1.6. Sistematika.	6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.	7
2.1.1. Tujuan dan Sasaran.	7
2.1.2. Indikator Tujuan	8
2.2. Perjanjian Kinerja	9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja.	10
3.2. Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.	11
3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	26
3.3.1. Pengukuran Kinerja	26
3.3.2. Evaluasi Kinerja	28

3.5.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja serta alternatif solusi	33
3.5.1.	Analisis Capaian Kinerja	30
3.5.2.	Indikator kinerja	34
3.6.	Akuntabilitas Keuangan	36
3.6.1	Efektifitas	38
3.6.2	Analisa Efesiensi	40
 BAB IV PENUTUP		 41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.3. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama BPPRD Kab. Barito Kuala Tahun 2023	8
Tabel 2.2.1. Perjanjian Kinerja (PK) BPPRD Kab. Barito Kula Tahun 2023	9
Tabel 3.1.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja	10
Tabel 3.1.2. Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Kinerja yang tidak tercapai	11
Tabel 3.2.1. Perbandingan Target Renstra dan Realisasi Kinerja	11
Tabel 3.2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2023 dan 2022	12
Tabel 3.2.3. Perbandingan Target dan Realisasi terhadap target akhir Renstra	13
Tabel 3.2.4. Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan angka Absolut	14
Tabel 3.2.5. Capaian Indikator Utama berdasarkan Angka Mutlak	17
Tabel 3.2.6. Capaian IKU BPPRD tahun 2023	25
Tabel 3.2.7. Capaian IKU BPPRD berdasarkan Prosentase	25
Tabel 3.2.8. Capaian IKU BPPRD berdasarkan Kategori	25
Tabel 3.3.1. Capaian Kinerja sasaran BPPRD Tahun 2023	26
Tabel 3.3.2. Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran BPPRD berdasarkan IKU	27
Tabel 3.3.3. Capaian Kinerja Sasaran BPPRD Tahun 2023	27
Tabel 3.3.4. Pencapaian Target Sasaran Strategis BPPRD Tahun 2023	27
Tabel 3.3.5. Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi Tahun ini Dengan Tahun Lalu Berdasarkan Angka Mutlak	29
Tabel 3.3.6. Capaian Kinerja Berdasarkan Prosentase Realisasi Kinerja (2022-2023)	30

Tabel 3.5.	Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif solusi mencapai IKU	33
Tabel 3.5.1.	Capaian IKU revisi berdasarkan angka Absolut	33
Tabel 3.6.1.	Komposisi Belanja BPPRD setelah perubahan	36
Tabel 3.6.2.	Pagu dan Realisasi terkait pencapaian Target sasaran dan indikator Kinerja BPPRD	37
Tabel 3.6.3.	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran BPPRD Tahun 2023	39
Tabel 3.6.4.	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran BPPRD Tahun 2023	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 40 Tahun 2020, tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Pengelolaan pajak dan retribusi dilakukan melalui tindakan pelayanan, pengawasan dan pembinaan dengan berlandaskan kepada peraturan perundangundangan perpajakan. Bukan hanya berupa kegiatan dalam lingkup administratif belaka, oleh karenanya pajak dan retribusi sangat berkaitan dengan tata kelola dan masuk kedalam lingkup kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam kajian administrasi perpajakan, salah satu ruang lingkup dalam administrasi perpajakan adalah tentang pemungutan pajak dan retribusi (collection) di suatu daerah.

Terkait dengan pengelolaan pajak sebagai sumber pendapatan daerah, retribusi juga termasuk ke dalam penerimaan daerah dan untuk membiayai pembangunan di suatu daerah. Berdasarkan pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa atau fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, setiap instansi wajib menyelenggarakan sistem akuntabilitas, di mana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi tersebut

kepada instansi yang lebih tinggi. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 ini disusun sebagai pertanggung jawaban atas rencana kerja SKPD Pemerintah Daerah Tahun 2023.

a. Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.

b. Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala antara lain adalah :

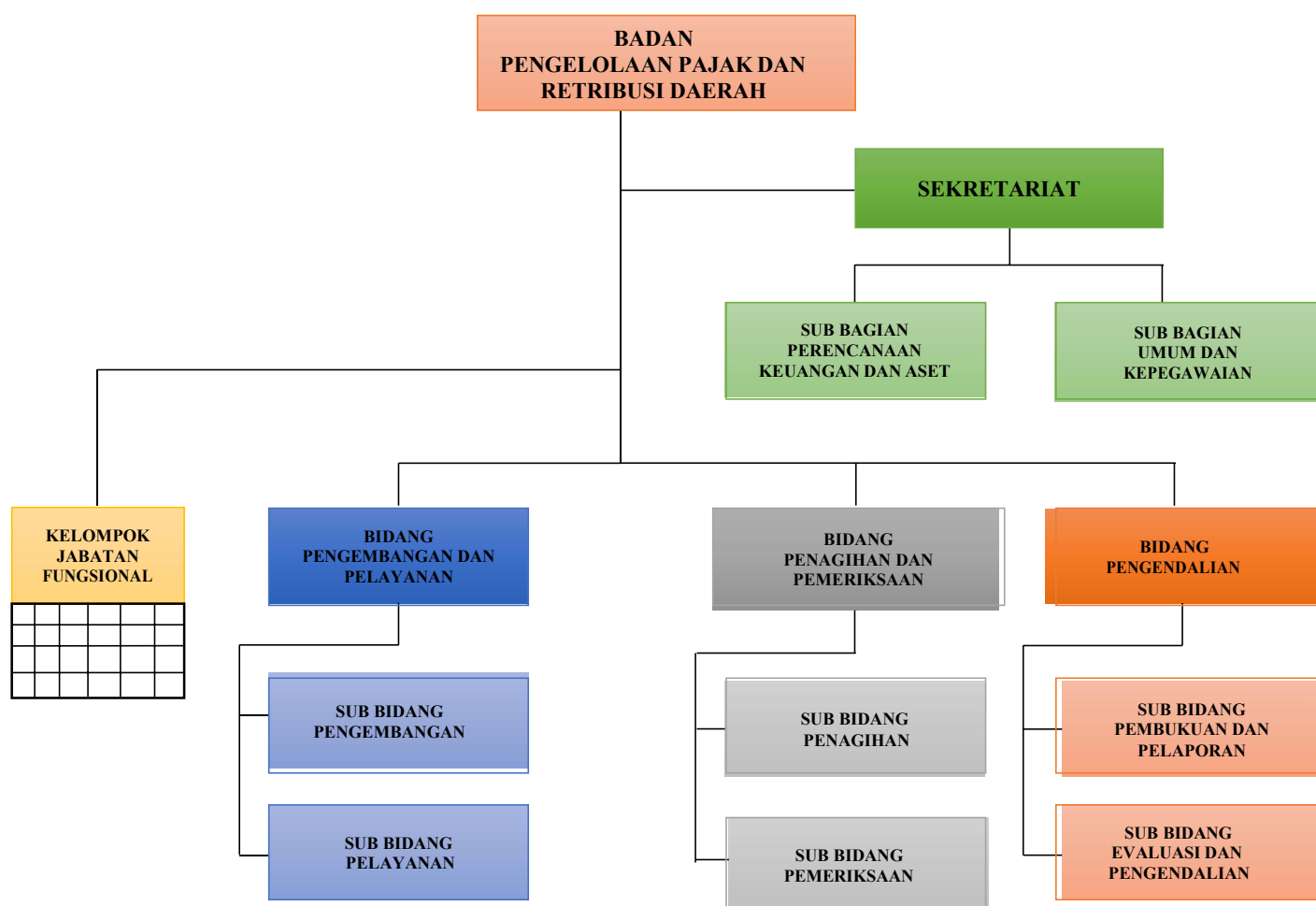
- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Pelaksanaan pembinaan umum dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Penghasil Pendapatan Asli Daerah.
- 4) Pengawasan dan Pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 5) Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, serta Kelompok Jabatan Fungsional, sedangkan 3 (tiga) Kepala Bidang dimaksud yaitu 1) Bidang Pengembangan dan pelayanan; 2) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dan 3) Bidang Pengendalian dan masing-masing Kepala Bidang dibantu 2 (dua) Kepala sub Bidang. Bidang Pengembangan dan Pelayanan terdiri dari Sub Bidang Pengembangan dan Sub Bidang Pelayanan, Bidang Penagihan

terdiri dari Sub Bidang Penagihan dan Sub Bidang Pemeriksaan, Bidang Pengendalian terdiri dari Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian dan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dan Sekretaris terdiri dari Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset (PKA) dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Umpeg) dengan Struktur Organisasi Sebagai gambaran, kami sajikan Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**



1.3. Fungsi Strategis

Fungsi Strategis menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut maka disusun beberapa strategi sesuai dengan misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yaitu :

- 1) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat untuk taat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Melaksanakan sistem informasi Pendapatan Asli Daerah.
- 3) Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan koordinasi evaluasi.
- 4) Melaksanakan pengembangan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Melaksanakan pendataan terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 6) Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- 7) Menyiapkan kemampuan profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur agar mampu memberikan pelayanan prima.
- 8) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran.
- 9) Meningkatkan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur.
- 10) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.

1.4. Isu Strategis

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat. Sehubungan dengan tugas-tugas pemerintahan tersebut maka peranan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sangat menentukan, mengingat dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Barito Kuala, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menemui kendala-kendala, baik dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya.

Permasalahan yang mendasar yang dihadapi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pelaksanaan roda Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Belum terlaksananya penerapakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku.
- 3) Masih belum optimal dalam pelaksanaan sistem penerapan optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) Masih diperlukan perbaikan-perbaikan data dasar terutama untuk data dasar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- 5) Terbatasnya kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah.
- 6) Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang, Programmer, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah, Juru Sita dan Tenaga Penyuluhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 7) Masih dalam upaya penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan pemungutan berbasis elektronik.

Isu Strategis yang akan dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala antara lain :

1. Mengintensifkan koordinasi antar SKPD terkait/SKPD Penghasil;
2. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang ideal guna melayani pendataan dan penilaian objek pajak, melayani penerimaan berkas, entry data serta operator consule, melayani penagihan dan pelayanan keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehingga pelayanan terhadap Wajib Pajak dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Kuala bisa lebih optimal;
3. Melakukan perbaikan data dasar terutama untuk data dasar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
4. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat/wajib pajak sehingga masyarakat / wajib pajak menyadari pentingnya pajak daerah untuk pembangunan daerah;
5. Adanya sanksi yang tegas bagi pengusaha/masyarakat/wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sehingga ada efek jera dan pengusaha/masyarakat/wajib pajak

termotivasi untuk membayar pajak;

6. Memberikan pelayanan proses birokrasi yang mudah dan cepat bagi pengusaha/wajib pajak;
7. Melaksanakan bintek/diklat guna peningkatan Sumber Daya Manusia pengelola PBB-P2 secara bertahap guna mengantisipasi tuntutan pelayanan terhadap wajib pajak.

1.5. Landasan Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

1.6. SISTEMATIKA.

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/255/KUM/2018, tanggal 4 Juni Tahun 2018, tentang Penetapan Rencana Strategis 2023 – 2026 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala maka tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah :

2.1.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 adalah :

1) Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun yang akan menjadi arah perjalanan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kriteria dan kewenangan yang dimiliki dengan tujuan sebagai berikut :

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Mengembangkan Potensi Lokal dengan Indikator Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2) Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan, program dan kegiatan. Sasaran secara efektif adalah sasaran yang bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah :

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Indikator Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah.
- Sedangkan sasaran yang terkait dengan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD dengan indikator Nilai Evaluasi Sakip BPPRD.

2.1.2. Indikator Tujuan

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala memiliki Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 2.1.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi	Nilai PAD dari sektor Pajak dan Retribusi	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah
				Nilai Penerimaan Retribusi Daerah
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemkab	Nilai SAKIP Pemkab	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD

2.2 Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1

**Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Rp)	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rp	26.240.000.000	Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.868.823.991
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	7.500.000		
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	75	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	4.257.721.137

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026, RKT Tahun 2023, Rencana Kerja Tahun 2023, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1.2.
Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak Tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.2. Capaian Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama, yang meliputi Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan demikian Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Tabel 3.2.1.
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	26.240.000.000	28.953.674.232	110,34
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	7.500.000	4.910.000	65,47
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	75	70,15	93,53

Tahun 2023 secara keseluruhan penerimaan Pajak Daerah mengalami peningkatan baik peningkatan target maupun peningkatan realisasi pendapatan, dari 9 (Sembilan) mata pajak yang menjadi sumber pendapatan pajak daerah ada 2 (dua) pajak daerah yang tidak tercapai yaitu Pajak Hiburan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) hal ini dikarenakan

1. Pajak Hiburan, realisasi pajak hiburan sangat rendah, karena hanya berharap pada objek permainan ketangkasan yang ada pada saat pasar rakyat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala. Realisasi pajak hiburan pada Tahun 2022 mencapai 83,76%, sedangkan pada Tahun 2023 pajak hiburan mengalami penurunan dengan realisasi sebesar 45,93%, ini dikarenakan adanya objek pajak hiburan yang tutup (Mama Refleksi) salah satu penyumbang pajak hiburan yang cukup besar sehingga tidak mencapai target yang ditentukan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Penerimaan tidak tercapai hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya, kesulitan menghubungi atau menemui wajib pajak, SPPT nya ada tapi tidak ada objeknya dan kurang optimalnya tindakan penagihan pajak.

**Tabel 3.2.2. 2022 kosongi akuntabilitas
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023
Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2022		% Capaian	TAHUN 2023		% Capaian
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	25.742.759.000	25.359.959,563	98,51	26.240.000.000	28.953.674.232	110,34
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	7.500.000	51,954.000.00	692,72	7.500.000	4.910.000	65,47
2.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD				75	70,15	93,53

Tahun 2023 target sebesar Rp. 26.247.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.958.584.232,- capaian 110,33 % naik dibanding dengan Tahun 2022 target sebesar Rp. 25.742.759.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.359.959.563 capaian 98,08% hal ini disebabkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala melihat adanya peluang penerimaan Pajak Daerah yang dapat dijadikan penyumbang Pendapatan Asli Daerah antara lain Pajak Hotel target sebesar Rp. 60.000.000,- realisasi sebesar Rp. 66.119.705,- atau 110,20%, Pajak Restoran target sebesar Rp. 1.500.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.378.877.305,- atau 158,59%, Pajak Reklame target sebesar Rp. 40.000.000,- realisasi sebesar Rp. 153.976.725,- atau 384,94%, Pajak Penerangan Jalan target sebesar Rp. 14.000.000.000,- realisasi sebesar Rp. 15.290.068.293,- atau 109,21%, Pajak Parkir target sebesar Rp. 35.000.000,- realisasi sebesar Rp. 46.526.600,- atau 132,93%, Pajak Sarang Burung Walet target Rp. 45.000.000,- realisasi sebesar Rp. 47.915.000,- atau 106,48%, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) target sebesar Rp. 7.000.000.000,- realisasi sebesar Rp. 7.584.324.014,- atau 108,35%. Dari 9 (Sembilan) mata pajak daerah dan 1 (satu) Retribusi Daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah ada 2 (dua) pajak daerah yang tidak mencapai target yaitu Pajak Hiburan target sebesar Rp. 60.000.000,-

dengan realisasi sebesar Rp. 27.557.053 atau 45,93% hal ini karena pajak hiburan hanya berharap pada objek permainan ketangkasan yang ada pada saat pasar rakyat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala, dan adanya objek pajak hiburan yang tutup (Mama Refleksi) sebagai salah satu penyumbang pajak hiburan yang cukup besar, sehingga untuk pajak hiburan tidak mencapai target yang ditentukan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) target sebesar Rp. 3.500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.358.309.537,- atau 95,95% hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya, kesulitan menghubungi atau menemui wajib pajak, SPPT nya ada tapi tidak ada objeknya dan kurang optimalnya tindakan penagihan pajak. Retribusi juga realisasinya sangat kecil yaitu target Rp. 7.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.910.000,- atau 65,47% yang di karenakan bahwa retribusi yang di pungut oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu retribusi penyewaan tanah dan bangunan, penyewaan atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yaitu sewa rumah dinas dan sewa tanah milik pemerintah daerah.

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame sebesar **Rp. 153.976.725,00** atau **384,94%** dari target sebesar **Rp. 40.000.000,00** terdapat selisih lebih sebesar **Rp. 113.976.725,00** Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tarif yang dikenakan di setiap jenis pajak reklame adalah sebesar 25 % yang didasarkan atas jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame. Tahun 2023 realisasi mencapai 384,94% dari target yang ditentukan, hal ini disebabkan adanya pendapatan dari pajak reklame yang belum tertagih di Tahun 2021 dan Tahun 2022 sehingga realisasi sangat jauh diatas target yang ditentukan

13

Tabel 3.2.3.
Perbandingan Terget dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap
Terget Akhir Tahun Renstra

NO	URAIAN	2022		PROSENTASE	2023		PROSENTASE
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1.	PAJAK HOTEL	60,000,000.00	60,892,176.00	101.49	60.000.000,00	66.119.705,00	110,20
2.	PAJAK RESTORAN	1,750,000,000.00	1,870,246,330.00	106.87	1.500.000.000,00	2.378.877.305,00	158,59
3.	PAJAK HIBURAN	75,000,000.00	62,820,957.00	83.76	60.000.000,00	27.557.053,00	45,93
4.	PAJAK REKLAME	56,000,000.00	82,550,100.00	147.41	40.000.000,00	153.976.725,00	384,94
5.	PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM	14,390,000,000.00	14,465,534,316.00	100.52	14.000.000.000,00	15.290.068.293,00	109,21
6.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN LAINNYA	24,259,000.00	24,775,250.00	102.13	-	-	-

7.	PAJAK PARKIR	35,000,000.00	40,145,800.00	114.70	35.000.000,00	46.526.600,00	132.93
8.	PAJAK AIR TANAH	45,000,000.00	48,130,000.00	106.96	-	-	-
9.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	3,500,000,000.00	3,442,384,488.00	98.35	45.000.000,00	47.915.000,00	106,48
10.	PBB-P2	-	-	-	3.500.000.000,00	3.358.309.537,00	95,95
11.	BPHTB	5,800,000,000.00	5,210,526,146.00	89.84	7.000.000.000,00	7.584.324.014,00	108,35
12.	RETRIBUSI DAERAH	7,500,000.00	51,954,000.00	692.72	7.500.000,00	4.910.000,00	65,47
JUMLAH		25,742,759,000.00	25,359,959,563.00	98.51	26.247.500.000,00	28.958.584.232,00	110,33

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

Realisasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 terjadi kenaikan yaitu dari Rp. 25.359.959.563,- menjadi Rp. 28.958.584.232,- hal ini disebabkan adanya usaha-usaha yang sudah dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Pajak Hotel Tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 8,58 %
hal tersebut karena selain semua wajib pajak hotel sudah pakai tapping box juga usaha bidang penagihan dan pemeriksaan rutin melakukan penagihan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak hotel yang ada di Kabupaten Barito Kuala.
- Realisasi Pajak Restoran tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami kenaikan 27,20 %
Penerimaan pajak restoran bukan hanya dari restoran atau rumah makan yang ada di Kabupaten

Barito Kuala tetapi juga pendapatan pajak katering yang berasal dari kegiatan makan minum di seluruh SKPD, Kecamatan-kecamatan, Desa-desa dan Kelurahan yang disetorkan Pajaknya sebesar 10% per kegiatan ke Kas Daerah. Kesadaran Wajib pajak membayar pajak katering karena sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi terhadap SKPD, Kecamatan dan Desa.

- Realisasi Pajak hiburan tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 56,13 % objek pajak hiburan yang ada di Kab. Barito Kuala hanya sedikit yaitu sebanyak 1 buah yaitu Water Boom Yasmin Residen Handil Bakti. Jumlah pengunjung hiburan setiap saat terus berkurang hal tersebut karena tidak adanya inovasi dari pemilik pajak hiburan waterboom yasmin residen akibatnya banyak pengunjung berpindah atau memilih hiburan di kota-kota lainnya. Hal itulah yang membuat pembayaran pajak hiburan jadi tidak tercapai.
- Realisasi Pajak reklame tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 86,53 % Hal ini karena adanya pendataan terhadap pajak reklame yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dari hasil data tersebut maka dilakukan penagihan dan teguran terhadap pajak reklame yang sudah terpasang tetapi belum melakukan pembayaran pajak reklame. Akhirnya dari surat teguran dan surat tagihan pajak reklame tersebut maka wajib pajak melakukan pembayaran pajak reklame ke BPPRD.
- Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,70 % Hal ini karena jumlah pelanggan listrik dan pemakaian listrik di Kabupaten Barito kuala terus meningkat. Data ini di dapat setelah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala (Kepala Badan, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dan Bidang Lainnya) melakukan konsultasi dan koordinasi ke PT PLN di Banjarbaru untuk meyakinkan data yang diberikan oleh PT PLN setiap bulan adalah benar setiap bulannya sesuai. Hasil pertemuan tersebut juga disepakati bahwa BPPRD akan melakukan Rekon ke Kantor PT PLN Banjarbaru.
- Realisasi Pajak Parkir Tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 15,89 % Peningkatan ini karena jumlah objek pajak yang bertambah seperti Alfa Mart dan Indo Mart seiring dengan perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Kuala.
- Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,45% Hal tersebut karena adanya penurunan produksi petani walet di tambah penurunan harga sarang walet di tingkat pembeli sarang walet.
- Realisasi penerimaan PBB-P2 Tahun 2022 ke Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 2,66%
Hal ini akibat terlambatnya pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang sebagian dipakai desa-desa untuk melunasi PBB P2.
- Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2022 ke 2023 kenaikan sebesar 45,56 %. Hal ini akibat telah membaiknya perekonomian di Kabupaten Barito Kuala membuat daya beli rumah meningkat di tambah dengan hubungan dengan para

notaris yang ada di Kabupaten Barito Kuala.

Pajak Daerah

Target Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 26.240.000.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 25.735.259.000,00 mengalami kenaikan 1,96%. Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp. 28.953.674.232,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 25.308.005.563,00 mengalami kenaikan 14,41%. Kenaikan realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 dibandingkan realisasi Tahun 2022 dari pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan BPHTB. Kenaikan realisasi ini antara lain karena dipasangnya alat tapping box yang merupakan salah satu cara pemerintah untuk meminimalisir kebocoran pajak daerah akibat kecurangan yang dilakukan oleh oknum sehingga penerimaan pajak daerah lebih transparan. Kesadaran wajib pajak akan kewajibannya menyetorkan pajak daerah. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait antara lain PT. PLN, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PPAT/Notaris yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Upaya dan kerja sama ASN BPPRD dalam perbaikan data, pelayanan, evaluasi dan penagihan terhadap wajib pajak. Selain mengalami kenaikan, ada beberapa pajak yang mengalami penurunan seperti pajak hiburan, pajak sarang burung walet dan PBB-P2. Penurunan ini disebabkan antara lain karena objek pajak hiburan yang ada di Kabupaten Barito Kuala sedikit. Adanya penurunan produksi petani walet dan penurunan harga sarang burung walet dari pihak pembeli. Pendistribusian SPPT PBB yang tidak maksimal dan terlambatnya pencairan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang sebagian dipakai desa-desa untuk melakukan kegiatan penagihan PBB-P2 menjadi salah satu penyebab menurunnya realisasi PBB-P2. Tahun 2023 pajak mineral bukan logam dan batuan tidak dipungut lagi karena Kabupaten Barito Kuala tidak mempunyai potensi untuk pajak mineral bukan logam dan batuan.

Upaya yang dilakukan Tahun 2024 Depan :

1. Tetap melakukan penagihan dan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang belum bayar atau terlambat bayar
2. Memberikan teguran terhadap wajib pajak yang tidak taat pajak
3. Melakukan verifikasi dan Validasi data PBB-P2 serta penghapusan Piutang PBB-P2
4. Melakukan pendataan dan menetapkan Wajib PBB P2 yang belum memiliki SPPT PBB-P2 sejak perusahaan tersebut berdiri dibatola
5. Mendata dan menagih pajak katering perusahaan dengan langsung mendatangi perusahaan-perusahaan.
6. Menyampaikan SPPT PBB P2 buku 1,2,3 tidak lagi ke Kecamatan-kecamatan tetapi akan dikumpulkan seluruh Kepala desa dan Camat di Kabupaten yang penyampaiannya oleh Bupati Barito Kuala sekaligus Evaluasi penerimaan PBB P2 untuk tahun-tahun sebelumnya

Retribusi Daerah

Retribusi yg dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala hanya retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sewa rumah dinas dan tanah daerah.

Tidak tercapainya target karena Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala tidak punya data rumah dinas mana yang termasuk dalam target Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sehingga tidak tahu rumah dinas mana yang harus ditagih.

Solusinya yaitu :

- Bersama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala di bidang Aset menginventarisir rumah dinas mana yg menjadi target Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sehingga jelas untuk melakukan penagihan.
- Mengusulkan untuk melakukan perbaikan rumah dinas yang selama ini banyak yang rusak sehingga kurang layak untuk dihuni.
- Menyesuaikan tarif sewa rumah dinas yang sudah diusulkan dan dimasukkan dalam Perda PDRD Nomor 1 Tahun 2024.

Tabel 3.2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Revisi Berdasarkan Angka Absolut
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rupiah	26.240.000.000	28.953.674.232	110,33
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rupiah	7.500.000	4.910.000	65,46
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	75	70,15	93,53

- Pada Tahun 2023 Realisasi Nilai Penerimaan Pajak Daerah 110,33%, angka ini diperoleh dengan cara :

Realisasi Nilai Penerimaan Pajak Daerah 2023 x 100%

Target Nilai Penerimaan Pajak Daerah 2023

28.953.674.232 x 100% = 110,33%

26.240.000.000

- Pada Tahun 2023 Realisasi Nilai Penerimaan Retribusi Daerah 65,47%, angka ini diperoleh dengan cara :

Realisasi Nilai Penerimaan Retribusi Daerah 2023 x 100%

Target Nilai Penerimaan Retribusi Daerah 2023

28.953.674.232 x 100% = 65,47%

26.240.000.000

Dari 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama satu Indikator Utama telah mencapai 100% atau lebih dari yang di targetkan Tahun 2023.

Ada 2 mata pajak yang tidak mencapai 100% yaitu Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) (95,95%) dan Pajak Hiburan (45,93 %) hal ini
LKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala 2023

dikarenakan :

1. PBB P2 tidak tercapai hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak ditemukan karena banyak wajib pajak yang tidak berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Kuala, kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya, kesulitan menghubungi atau menemui wajib pajak, SPPT nya ada tapi tidak ada objeknya dan kurang optimalnya tindakan penagihan pajak.

masih banyak desa-desa yang tidak maksimal membantu melakukan penyampaian SPPT PBB dan penagihan ke wajib pajak PBB di desa padahal desa sudah diberikan dana bagi hasil pajak dan retribusi oleh pemerintah. Dari dana bagi hasil pajak dan retribusi tersebut adalah sebagian diperuntukkan kegiatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Penyampaian SPT PBB dan Penagihan PBB P2). Alasan lainnya adalah karena keterlambatan pembayaran Dana Bagi hasil Pajak dan retribusi yang cair sampai di akhir tahun 2023 oleh pemerintah sehingga desa-desa tidak sempat melakukan kegiatan penagihan PBB-P2.

2. Pajak Hiburan hal ini dikarenakan pajak hiburan hanya berharap pada objek permainan ketangkasan yang ada pada saat pasar rakyat dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Barito Kuala, dan adanya objek pajak hiburan yang tutup (Mama Refleksi) sebagai salah satu penyumbang pajak hiburan yang cukup besar, sehingga untuk pajak hiburan tidak mencapai target yang ditentukan, dan Karena Potensi pajak hiburan yang ada di Kabupaten Barito Kuala hanya sedikit yaitu sebanyak 1 buah yaitu Water Boom Yasmin Residen Handil Bakti. Jumlah pengunjung hiburan setiap saat terus berkurang hal tersebut karena tidak adanya inovasi dari pemilik pajak hiburan waterboom yasmin residen akibatnya banyak pengunjung berpindah atau memilih hiburan di kota-kota lainnya.

Tabel 3.2.5.
Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Angka Mutlak
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2023

No	SasaranStrategis	Indikator kinerja Utama	Program	Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	% Capaian
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	26.240.000.000	25.359.959.563	28.953.674.232	110,33
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.500.000	51,954,000	4.910.000	65,46
	Total				26.247.500.000	25.411.913.563	28.958.584.232	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		75		70,15	93,53

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan indikator :

1. Nilai Penerimaan Pajak Daerah
2. Nilai Penerimaan Retribusi Daerah

Sasaran strategis 2

meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD dengan indikator :

Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD

Tabel 3.2.6.
Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak Dan Restribusi Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	26.247.500.000	28.958.584.232	110,33
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	75	70,15	93,53

Tabel 3.2.7.
Capaian IKU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Prosentase
Tahun 2023

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	0
= 100	Tercapai/Sesuai target	4
>100	Melebihi target	2

Dilihat dari tabel di atas Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah pada Tahun 2023 dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama ada 1 tidak tercapai target dan 1 yang melebihi target.

Tabel 3.2.8.
Capaian IKU Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan Kategori
Tahun 2023

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	6
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

1.1. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS.

1.1.1. Pengukuran Kinerja

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Nomor : 052/013/BPPRD/2020 Tahun 2020, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
1	Sasaran Strategis 1	2	110,33	Melebihi Target
2	Sasaran Strategis 2	1	93,53	Tidak Tercapai

Dari tabel di atas artinya Capaian Sasaran Strategis 1 Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah telah melebihi target. Untuk memperoleh angka rata-rata capaian sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Berdasarkan IKU Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian (%)	Kategori
1	Nilai Penerimaan Pajak Daerah Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	110,33	Sangat Baik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	93,53	Sangat Baik

Tabel 3.3.3
Capaian Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata CapaianKinerja Sasaran	0-49,99 Sangat kurang	50-64,99 Kurang	65-74,99 Cukup	75-89,99 Baik	>90 Sangat Baik
1	1	2	110,33%	0	0	0	0	2
2	2	1	93,53%	0	0	0	0	1

Tabel 3.3.4
Pencapaian Target Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun 2023

		Jumlah		Tingkat Tercapainya					
No.	Sasaran	Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Melebihi Target (>100)		Sesuai Target (=100)		Dibawah Target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Sasaran Strategis 1	2	110,33%	2	110,33	0	0	0	0
2	Sasaran Strategis 2	1	93,53%	1	93,53	0	0	0	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama tingkat pencapaiannya melebihi target yaitu Nilai Penerimaan Pajak Daerah, Nilai Penerimaan Retribusi Daerah dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD.

1.1.2. Evaluasi Kinerja

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sasaran Strategis ini mendukung tercapainya Misi 2 RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017-2022 yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Teknologi Berbasis Pertanian dengan sasaran meningkatnya Pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk melihat capaian sasaran strategi “Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, maka ada (tiga) Indikator Kinerja Utama yang digunakan yaitu:

1. Nilai Penerimaan Pajak Daerah
2. Nilai Penerimaan Retribusi Daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD

Tabel 3.3.5
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Realisasi
dan Capaian Tahun ini dengan Realisasi Tahun Lalu Berdasarkan Angka Mutlak

No .	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022 Capaian	Tahun 2023 Capaian	Selisih Capaian	Ket
1	Nilai Penerimaan Pajak Daerah Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rp.	25.359.959.563,-	28.958.584.232,-	114,19%	Naik
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai		70,15%		

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian tahun ini (2023) dengan capaian tahun lalu (2022) berdasarkan angka mutlak, maka sangat jelas terlihat bahwa sasaran 1 indikator 1 dan 2 mengalami peningkatan, hal ini disebabkan semakin meningkatnya koordinasi dengan semua pihak terkait dengan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan didukung dengan program kegiatan yang mengarah kepeningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 3.3.6
Capaian Kinerja Berdasarkan Prosentase Realisasi Kinerja
5 (lima) Tahun Terakhir (2019 – 2023)

No.	Indikator Sasaran	Tahun 2019 %	Tahun 2020 %	Tahun 2021 %	Tahun 2022 %	Tahun 2023 %
1.	Nilai Penerimaan Pajak Daerah Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD					70,15

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Kinerja untuk Indikator Sasaran 1 Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai seratus persen, artinya target setiap tahun yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah telah terlampaui, sedangkan keberhasilan dibidang tidak terlapas dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dimasing-masing Bidang dan Sub Bidang, sehingga kedepan perlu ditingkatkan lagi dalam menentukan kegiatan masing-masing Bidang dan Sub Bidang yang lebih mengarah bagaimana caranya bisa meningkatkan kinerja di bidang masing-masing, sehingga akhir dari tujuan semuanya ini adalah meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama Esselon II.

1. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

- Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah diuraikan pada Tabel-tabel diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Revisi Berdasarkan Angka Absolut
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rp	26.240.000.000	28.953.674.232	110,33
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	7.500.000	4.910.000	65,46
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	75	70,15	93,53

2. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

- **Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah diuraikan pada Tabel-tabel diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Revisi Berdasarkan Angka Absolut
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rp	26.240.000.000	28.953.674.232	110,33
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	7.500.000	4.910.000	65,46
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	75	70,15	93,53

3. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

- Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah diuraikan pada Tabel-tabel diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama Revisi Berdasarkan Angka Absolut
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	Rp	26.240.000.000	28.953.674.232	110,33
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Rp	7.500.000	4.910.000	65,46
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Nilai	75	70,15	93,53

- Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah karena :

Potensi Pajak Daerah yang mendaftar ditetapkan menjadi objek Pajak Daerah dapat dilayani didukung oleh :

- Tempat Pelayanan yang representatif dan berada di Lokasi yang terjangkau
- Sumber Daya Manusia yang cukup dan berkualitas
- Adanya aplikasi SIAPDATE yang mempermudah wajib pajak untuk melakukan pendaftaran atau transaksi pembayaran.

Indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah sampai dengan Tahun 2023 telah terealisasi peningkatannya sebesar 217,69%, sedangkan target sampai akhir Renstra sebesar 100 % artinya Indikator Kinerja Persentase

Peningkatan Potensi Wajib Pajak Daerah (WP) dan Tingkat Kepuasan Pelayanan LKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala 2023

Pajak dan Retribusi Daerah tercapai sebesar 100%, sehingga pada tahun 2023 akhir target Renstra yang harus dicapai sebesar 100%, agar target akhir renstra dapat tercapai 100%, maka diperlukan kerja keras terutama untuk mengoptimalkan potensi pajak lainnya.

Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pembayaran Piutang Pajak dan Persentase Wajib Pajak Daerah yang taat pasca pembinaan dan pemeriksaan sampai dengan Tahun 2023 telah mengalami penurunan sebesar 98,51%, sedangkan target sampai akhir renstra sebesar 100%, artinya Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pembayaran Piutang Pajak (Rp) dan Persentase Wajib Pajak Daerah yang taat pasca pembinaan dan pemeriksaan (WP) sampai dengan tahun 2023 telah terealisasi sebesar 239,33%, jika dibandingkan dengan target sampai akhir renstra (2023), sebesar 100% hal ini disebabkan ada 2 (dua) pajak daerah yang mengalami penurunan pendapatan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), dan Pajak Hiburan.

Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak Daerah yang taat pasca pembinaan dan pemeriksaan (WP) sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 120%, target sampai akhir renstra sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya 100%, hal ini disebabkan adanya kegiatan pembinaan terhadap Wajib Pajak yang selalu dilakukan dan bekerja sama dengan SKPD terkait.

Indikator Kinerja Persentase Penyampaian Laporan Pendapatan yang Benar dan Tepat Waktu dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100 %.

Indikator Kinerja Persentase Penyampaian Laporan evaluasi dan pengendalian yang Benar dan Tepat Waktu dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100 %.

Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Indikator kinerja pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 ada 2 (dua) Program dengan 10 (sepuluh) kegiatan yaitu Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang dengan rincian dan pagu anggaran masing-masing sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten sebesar Rp. 5.548.032.372,00 terdiri dari 6 (Enam) Kegiatan :
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 4.257.721.137,00
- Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 46.288.800,00
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 65.812.450,00
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 777.731.710,00,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 225.040.275,00
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 175.438.000,00
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.199.329.909,00 yang terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijaksanaan Pajak Daerah Rp. 292.860.048,00
 - Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeriksaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Rp. 116.391.925,00
 - Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp. 160.443.600,00
 - Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Rp. 154.647.176,00
 - Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp. 215.427.005,00
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp. 259.623.155,00

4. Akuntabilitas Keuangan.

Selama Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar **Rp. 6.747.425.281,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 6.120.610.810,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **97,72%**.

Komposisi Belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.6.1.
Komposisi Belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2023 Setelah Perubahan

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	4.257.721.137,00	3.746.462.367,00	87,99
2	Belanja Langsung	2.489.704.144,00	2.374.148.443,00	95,36
Jumlah		6.747.425.281,00	6.120.610.810,00	90,71

Sumber: SIPD BPPRD 2023

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Belanja Tidak Langsung memberikan kontribusi sebesar 87,99%, terhadap realisasi belanja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023, dan sisanya sebesar 12,01% disumbangkan oleh belanja langsung.

Adapun pagu dan realisasi anggaran Belanja Langsung Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.489.704.144,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.374.148.443,00,- atau 95,365 %. Dari total Belanja Langsung tersebut pagu yang terkait langsung dengan capaian Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.199.392.909,00,- selebihnya adalah belanja rutin yang dikelola oleh Sekretariat.

Realisasi Anggaran per program yang mendukung sasaran dan masing masing Indikator Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 3.6.2.
Pagu Dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
Dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.489.704.144,00	2.374.148.443,00	95,36
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	4.257.721.137,00	3.746.462.367,00	87,99
	Rata-rata Kinerja			6.747.425.281,00	6.120.610.810,00	90,71

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa besar anggaran program utama yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mendukung tercapainya indikator Kinerja Utama dengan anggaran sebesar Rp. 2.489.704.144,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.374.148.443,00 (87,99%) dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 4.257.721.137,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.746.462.367,00 (90,71).

3.6.1 Efektifitas

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian sasaran Badan Pengelolah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, kita pahami terlebih dulu apa yang dimaksud efektivitas.

Efektivitas menurut Mardiasmo (2009; 132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengantujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Rumus Pengukuran efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 690.900-237 Tahun 1996, tentang kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan, penetapan tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Efektif : > 100 %
- b. Efektif : 90 % - 100 %
- c. Cukup Efektif : 80 % - 90 %
- d. Kurang Efektif : 60 % - 80 %
- e. Tidak Efektif : 0 % - 60 %

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.3.
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Efektifitas
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	10,34	28.953.674.232	
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	65,47	4.910.000	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	93,53	70,15	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 adalah **Efektif** terhadap pencapaian kinerja sasaran Strategis Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.

3.6.2 Analisa Efisiensi

Analisa Efisiensi Anggaran belanja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Anggaran belanja dimaksud adalah total realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung (Muhammad Mashun). Mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 690.900-237 Tahun 1996, tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan, penetapan tingkat efisiensi anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Sangat Efisien : 0 % - 60 %
- b. Efisien : 60 % - 80 %
- c. Cukup Efisien : 80 % - 90 %
- d. Kurang Efisien : 90 % - 100 %
- e. Tidak Efisien : > 100 %

Efisiensi anggaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.4.
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Anggaran
Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah
Tahun 2023

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Realisasi			Efisiensi
				Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pajak Daerah dan Restribusi Daerah	2	110,34	26.240.500.000	28.953.674.232	110,34	
			65,47	7.500.000	4.910.000	65,47	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPRD	1	93,53	75	70,15	93,53	

$$((26.240.000.000 \times 110,34) - 28.953.674.232) + ((7.500.000 \times 65,47) - 4.910.000)$$

$$(26.240.000.000 \times 110,34) + (7.500.000 \times 65,47)$$

$$= 2.866.367.925.768 + 486.115.000$$

$$\begin{aligned}
 & 2.895.886.675.000 + 491.025.000 \\
 &= \frac{2.866.854.040.768}{2.896.377.700.000} \times 100\% \\
 &= 98,98\%
 \end{aligned}$$

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran public dan prinsip Pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan Sumber Daya Anggaran yang **Sangat Efisien** dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2019, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, maka Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023, dalam rangka mencapai target dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bisa terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menghantarkan pada Realisasi Sasaran dan seluruh Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala di Tahun 2023. Pada Tahun 2023, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 1 (satu) Sasaran dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023. Target tersebut adalah **Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** dengan indikator yaitu Nilai Penerimaan Pajak Daerah dan Nilai Penerimaan Retribusi Daerah.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Indikator Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari tiga Indikator Kinerja Utama adalah 110,33%. Capaian ini masuk kategori sangat

baik. Tercapainya sasaran kinerja Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah tahun 2023 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, antara lain adalah menetapkan seluruh indikator kinerja ini merupakan kontrak kerja antara pejabat pemegang program/kegiatan dengan pejabat di atasnya. Disamping itu dilakukan juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Koordinasi antar subbidang dan bidang dan *stakeholder eksternal* lainnya terus dilakkukan, ini penting agar antar program dan kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan proses yang telah ditetapkan.

Walaupun capaian Indikator Kinerja Utama pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 ini masuk dalam kategori sangat baik, tetapi untuk tahun yang akan datang kami berkomitmen tetap berusaha mempertahankan nilai yang sudah dicapai dan bahkan nilai tersebut harus ditingkatkan lagi.

KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN 2023

KEGIATAN SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN TAHUN 2023

**Pembongkaran Reklame rokok di wilayah Kab. Batola bersama tim terkait
(Satpol PP, DPMPTSP dan BPPRD)**



Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan





KEGIATAN SUBBIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN TAHUN 2023

**DOKUMENTASI PENDAMPINGAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI PIUTANG PBB P-2 TAHUN 2023
DI DESA SEMANGAT DALAM KECAMATAN ALALAK
PADA TANGGAL 21 OKTOBER 2023**



**DOKUMENTASI PENDAMPINGAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI PIUTANG PBB P-2 TAHUN 2023
DI DESA SEMANGAT DALAM KECAMATAN ALALAK
PADA TANGGAL 22 OKTOBER 2023**



**DOKUMENTASI PENDAMPINGAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI PIUTANG PBB P-2 TAHUN 2023
DI DESA SEMANGAT DALAM KECAMATAN ALALAK
PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2023**



**DOKUMENTASI PENDAMPINGAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI PIUTANG PBB P-2 TAHUN 2023
DI DESA SEMANGAT DALAM KECAMATAN ALALAK
PADA TANGGAL 24 OKTOBER 2023**



**DOKUMENTASI PEMERIKSAAN BPHTB PADA PPAT DAN PENDAMPINGAN VERIFIKASI
DAN VALIDASI PIUTANG PBB P-2 TAHUN 2023 DI KECAMATAN ALALAK
PADA TANGGAL 25 OKTOBER 2023**



**DOKUMENTASI PENDAMPINGAN
VERIFIKASI DAN VALIDASI PIUTANG PBB P-2 TAHUN 2023
DI DESA SEMANGAT DALAM KECAMATAN ALALAK
PADA TANGGAL 3 NOVEMBER 2023**



**DOKUMENTASI PENANDATANGANAN MoU DAN
PRA PEMAPARAN EVALUASI PJ BUPATI
DI JAKARTA PADA TANGGAL 5 s.d 8 NOVEMBER 2023**



**DOKUMENTASI STUDY KOMPERATIF PERBUB PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH DI BAPENDA KOTA BATU MALANG JAWA TIMUR**



**DOKUMENTASI KOORDINASI DAN KONSULTASI
TERKAIT RANCANGAN PERDA DAN RANCANGAN PERBUP
TAHUN 2023 DI BAPENDA KABUPATEN BANDUNG**



KEGIATAN SUBBIDANG PENGENDALIAN TAHUN 2023

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

REKONSILIASI DATA PAJAK DAERAH KE BANK KALSEL KANTOR PUSAT DI BANJARMASIN



Rekonsiliasi dan koordinasi pembukuan dan pelaporan pada objek pajak yang dipasang alat transaksi pembayaran online



Rumah makan pawon tlogo alalak



CAFÉ BBC MARABAHAN



WATERBOOM YASMIN RESIDENCE ALALAK



Koordinasi terkait pelaksanaan uji petik ke Rocket Chicken Rocket Chicken Trans Kalimantan



Rocket Chicken Keruwing



Rocket Chicken Griya Permata



Rocket Chicken Veteran Marabahan



Rocket Chicken Kartini Marabahan



Rocket Chicken Anjir Pasar



**Melakukan Uji Petik
ke Rocket Chicken yang ada di Kabupaten Barito Kuala bulan Juni dan Juli 2023
Rocket chicken trans kalimantan**



Rocket chicken griya permata



Mengumpulkan SSPD Pajak Daerah yang disetorkan wajib pajak pada Bank Kalsel Cabang Pembantu Anjir Pasar dan Cabang Pembantu Handil Bakti

Bank Kalsel Cabang Pembantu Anjir Pasar



Bank Kalsel Cabang Pembantu Handil Bakti



**Melakukan koordinasi persiapan penyusunan laporan piutang PBB-P2
Tahun 2023**

KECAMATAN TABUNGANEN



KECAMATAN TAMBAN



**Menghadiri Undangan Rapat Kerja Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah
(FKPPD) se Kalimantan Selatan Tahun 2023
Rabu - Kamis, 12 – 13 Juli 2023
di Hotel Treepark Jl. A. Yani KM 6 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar**



koordinasi dan konsultasi
Koordinasi penambahan alat tapping device
ke PT. Cartenz Technology Indonesia di Jakarta



Konsultasi tentang Insentif Pajak Daerah dan Pola Dana Stimulus untuk kegiatan PBB-P2 bagi
Kelurahan ke Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri di Jakarta



Konsultasi dan Koordinasi terkait Pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Barito Kuala ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta



Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

Evaluasi alat rekam pajak online

Rumah makan soto atas jembatan



Rocket chicken trans kalimantan



Waterboom Yasmin residence



Evaluasi capaian pembayaran pbb-p2 tahun 2023

Kecamatan anjir muara



Kecamatan mandastana



Kecamatan mekarsari



Kecamatan tamban



**Rekapitulasi Penetapan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2023**

NO	JENIS PAJAK	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	JLH
1	PAJAK HOTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PAJAK RESTORAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PAJAK HIBURAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PAJAK REKLAME	14	4	1	0	2	8	3	9	0	32	5	0	0
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PAJAK PARKIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PBB P2	0	110	234	82	77	107	143	223	66	136	57	112	1.424
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	BPHTB	30	75	67	43	85	79	87	125	212	165	135	87	1.190
10	RETRIBUSI	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	6
	Jumlah	46	189	304	125	164	194	233	358	278	333	195	200	2612

**Rekapitulasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2023**

NO	JENIS PAJAK	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	Jlh
1	PAJAK HOTEL	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
2	PAJAK RESTORAN	8	5	4	4	6	8	4	8	4	5	8	3	75
3	PAJAK HIBURAN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
4	PAJAK REKLAME	1	1	1	1	2	2	3	7	2	3	1	5	29
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PAJAK PARKIR	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
7	PBB P2	106	168	187	126	358	227	394	346	311	263	169	147	2802
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3
9	BPHTB	50	30	20	20	30	30	65	98	100	54	58	27	582
10	RETRIBUSI	2	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5
	Jumlah	274	260	272	204	472	323	562	519	485	395	306	286	3.592

Rekapitulasi Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023

NO	JENIS PAJAK	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	Jlh
1	PAJAK HOTEL	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	12
2	PAJAK RESTORAN	25	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	28
3	PAJAK HIBURAN	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4	PAJAK REKLAME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PAJAK PARKIR	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
7	PBB P2	50	2	2	2	5	5	5	5	6	8	8	8	8	64
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	4
9	BPHTB	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14
10	RETRIBUSI	6	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	6
		145	9	9	9	14	13	13	14	13	17	16	20	19	166

Rekapitulasi Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023

NO	JENIS PAJAK	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	Jlh
1	PAJAK HOTEL	13	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	4	0	13
2	PAJAK RESTORAN	13	0	2	0	1	1	1	1	3	1	1	2	3	16
3	PAJAK HIBURAN	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3
4	PAJAK REKLAME	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	5
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PAJAK PARKIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PBB P2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
9	BPHTB	13	1	3	1	1	2	1	1	3	1	1	4	1	20
10	RETRIBUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50	1	6	5	2	5	5	3	8	5	5	10	5	60

Rekapitulasi Laporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023

NO	JENIS PAJAK	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	Jumlah
1	PAJAK DAERAH	36	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	36

Rekapitulasi Evaluasi dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2023

NO	JENIS PAJAK	Target	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	Jumlah
1	PAJAK DAERAH	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK) PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BARITO KUALA
 SKPD / ORGANISASI : BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 BULAN : DESEMBER 2023

KODE					BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		TARGET KINERJA PROGRAM / KEGIATAN				REALISASI CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN				BOBOT TB (%)	URAIAN SINGKAT PROSES PENCAPAIA N KINERJA
							INDIKATOR PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN			INDIKATOR KEGIATAN					
							HASIL	SEBUTAN OUTPUT	JUMLAH OUTPUT	PAGU (Rp)	JUMLAH OUTPUT	%	PAGU (Rp)	%		
1					2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN			20,872	6,747,425,281.00	20,229	96.92	6,120,610,810.00	90.71	0.94	
5	1	01				Adiministrasi Keuangan Perangkat Daerah										
5	1	01	01	01	1	Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji (OB), Terbayarnya Tambahan Penghasilan (OB), Terbayarnya Insentif Pemungutan Daerah	gaji, Tambahan Penghasilan, Insentif Pemungutan Daerah (Gaji 14 Bln, TPP 13 Bln, Insentif IV Triwulan) (1 tahun)	12	4,257,721,137.00	12	100.00	3,746,462,367.00	87.99	0.88	
						JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG			12	4,257,721,137.00	12	100.00	3,746,462,367.00	87.99	1.14	

5	02	01	2.01			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3,905	46,288,800.00	3,905	100.00	43,978,800.00	95.01	0.95	
5	02	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (1 Tahun)		3,400	11,299,200.00	3,400	100.00	11,299,200.00	100.00	0.00	
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Lembar)		75	750,000.00	75	100.00	750,000.00	100.00	1.00	
							Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat		394	7,910,000.00	394	100.00	7,900,000.00	99.87	1.00	
							Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Harian (484 Hari)		12	26,200,000.00	12	100.00	23,900,000.00	91.22	0.91	
							Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln)		12	57,600.00	12	100.00	57,600.00	100.00	1.00	
							Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln)		12	72,000.00	12	100.00	72,000.00	100.00	1.00	
5	02	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		12	65,812,450.00	8.00	66.67	42,275,590.00	64.24	0.96	
						Belanja Bimbingan Teknis	Biaya Kontribusi Mengikuti Diklat/Bimtek/Pelatihan (OK)		6	39,000,000.00	3	50.00	19,500,000.00	50.00	1.00	
						Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Terbayarnya Perjalanan Dinas Biasa Pendidikan dan Pelatihan (OK)		6	26,812,450.00	5	83.33	22,775,590.00	84.94	1.02	
5	02	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya fasilitas administrasi umum perkantoran		11,582	777,731,710.00	11,161	96.37	772,341,273.00	99.31	0.97	

5	02	01	2.0 6	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Alat Listrik Untuk Penerangan Gedung Kantor (8 Jenis)	8	4,601,700.00	8	100.00	4,596,270.00	99.88	0,00	
5	02	01	2.0 6	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor, kertas cover dan bahan komputer (31 Macam)	31	83,297,540.00	31	100.00	83,268,330.00	99.96	1.00	
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Tersedianya Alat Pendingin, Pesawat Telepon, Laptop, Peralatan Mini Computer, dan Hardisk Eksternal / Internal (6 Jenis)	14	134,913,410.00	14	100.00	134,305,000.00	99.55	0,00	
	02	01	2.0 6	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah porsi makanan dan minuman harian pegawai, tamu dan rapat (Porsi)	11,318	82,145,000.00	10,900	96.31	79,060,000.00	96.24	0,00	
5	02	01	2.0 6	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (7 Jenis)	7	163,057,810.00	7	100.00	163,056,670.00	100.00	1.00	
5	02	01	2.0 6	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundang-Undangan		Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (45 Eksemplar)	45	5,062,500.00	42	93.33	4,665,000.00	92.15	1.01	
5	02	01	2.0 6	07		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (OK)	159	304,653,750.00	159	100.00	303,390,003.00	99.59	1.00	
5	02	01	2. 08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya fasilitas administrasi umum perkantoran		307	225,040,275.00	307	100.0 0	211,174,048.00	93.84	1.07	
5	02	01	2.0 8	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya benda pos matrai dan perangko kilat (119 Lembar)	169	1,653,000.00	169	100.00	1,644,000.00	99.46	0,00	
								Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Harian 2 oh (484 Hari)	12	26,200,000.00	12	100.00	23,900,000.00	91.22	1.10	

							Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	57,600.00	12	100.00	57,600.00	100.00	1.00	
							Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	72,000.00	12	100.00	72,000.00	100.00	1.00	
5	02	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Telepon (Bln)	12	3,000,000.00	12	100.00	2,278,311.00	75.94	1.32	
							Terbayarnya Tagihan Air (Bln)	12	3,000,000.00	12	100.00	2,729,000.00	90.97	1.10	
							Terbayarnya Tagihan Listrik (Bln)	12	102,000,000.00	12	100.00	98,687,137.00	96.75	1.03	
							Terbayarnya Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV berlangganan (Bln)	12	24,000,000.00	12	100.00	20,935,800.00	87.23	1.15	
5	02	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya alat kebersihan (13 Macam)	17	14,138,475.00	17	100.00	14,091,000.00	99.66	1.00	
							Terbayarnya Jasa Tenaga Kebersihan (968 Hari)	12	47,160,000.00	12	100.00	43,020,000.00	91.22	1.10	
							Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Paket)	1	3,500,000.00	1	100.00	3,500,000.00	100.00	1.00	
							Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	115,200.00	12	100.00	115,200.00	100.00	1.00	
							Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	144,000.00	12	100.00	144,000.00	100.00	1.00	
	02	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya fasilitas administrasi umum perkantoran	780	175,438,000.00	779	99.87	172,515,409.00	98.33	1.02	

5	02	01	2.0 9	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		51	82,798,400.00	51	100.0 0	81,495,609.00	98.43	1.02	
								12	40,098,400.00	12	100.00	40,085,889.00	99.97	1.00	
								5	10,000,000.00	5	100.00	9,996,000.00	99.96	0.00	
								12	8,100,000.00	12	100.00	6,813,800.00	84.12	1.19	
								22	24,000,000.00	22	100.00	23,999,920.00	100.00	1.00	
								6	600,000.00	6	100.00	600,000.00	100.00	1.00	
5	02	01	2.0 9	02		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terjaganya keamanan gedung kantor	688	56,379,600	689	100.1 5	56,329,800.00	99.91	1.00	
								332	16,425,000.00	332	100.00	16,425,000.00	100.00	1.00	
								332	16,425,000.00	332	100.00	16,425,000.00	100.00	1.00	
								12	57,600.00	12	100.00	52,800.00	91.67	1.09	

								Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	72,000.00	12	100.00	66,000.00	91.67	1.09	
								Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1	23,400,000.00	1	100.00	23,361,000.00	99.83	0.00	
							Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	41	36,260,000.00	39	95.12	34,690,000.00	95.67	1.01	
								Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan Komputer (Pemeliharaan Server Pajak Daerah)	2	800,000.00	2	100.00	800,000.00	100.00	1.00	
5	02	01	2.0 9	03				Terpeliharanya Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Kantor- Alat Kantor lainnya (Unit), Terpeliharanya Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Alat Pendingin (Unit)	41	28,510,000.00	39	95.12	26,940,000.00	94.49	0.99	
								Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2	2,200,000.00	2	100.00	2,200,000.00	100.00	1.00	
								Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2	2,250,000.00	2	100.00	2,250,000.00	100.00	0.00	
								Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2	2,500,000.00	2	100.00	2,500,000.00	100.00	0.00	

5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah									
						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		4,274.0 0	1,199,392,909.00	4,057.0 0	94.92	1,131,863,323.00	94.37	1.01	
5	02	04	2.0 1	02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		868	292,860,048.00	868	100.0 0	284,268,498.00	97.07	1.03	
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Lembar)	224	73,870.00	224	100.00	73,870.00	100.00	0.00	
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (5 Eksemplar)	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
								Belanja Kawat/Faksimili/Int ernet/TV Berlangganan (12 Bulan)	12	18,000,000.00	12	100.00	16,356,123.00	90.87	1.10	
								Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	217	9,331,000.00	217	100.00	9,331,000.00	100.00	0.00	
								Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Harian (1,452 Hari)	12	78,600,000.00	12	100.00	71,700,000.00	91.22	1.10	
								Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	172,800.00	12	100.00	172,800.00	100.00	1.00	
								Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	216,000.00	12	100.00	216,000.00	100.00	1.00	
								Terbayarnya Perjalanan Dinas Biasa (OH)	40	82,177,000.00	40	100.00	82,173,680.00	100.00	1.00	

								Terbayarnya Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	339	104,289,378.00	339	100.00	104,245,025.00	99.96	1.00	
5	02	04	2.0 1	02		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Disusun		296	116,391,925.00	296	100.0 0	114,753,964.00	98.59	1.01	
								Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Harian (242 Hari)	12	13,100,000.00	12	100.00	11,950,000.00	91.22	1.10	
								Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	28,800.00	12	100.00	28,800.00	100.00	1.00	
								Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	36,000.00	12	100.00	36,000.00	100.00	1.00	
								Terbayarnya Perjalanan Dinas Biasa (OH)	47	60,142,250.00	47	100.00	59,838,505.00	99.49	1.01	
								Terbayarnya Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	213	43,084,875.00	213	100.00	42,900,659.00	99.57	1.00	
5	02	04	2.0 1	09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		189	160,443,600.00	189	100.0 0	150,103,574.00	93.56	1.07	
								Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Harian (484 Hari)	12	26,200,000.00	12	100.00	23,900,000.00	91.22	1.10	
								Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Bulan/paket)	5	50,552,500.00	5	100.00	42,864,324.00	84.79	1.18	
								Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	57,600.00	12	100.00	57,600.00	100.00	1.00	

							Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	72,000.00	12	100.00	72,000.00	100.00	1.00	
							Terbayarnya Perjalanan Dinas Biasa (OH)	18	48,330,500.00	18	100.00	47,978,650.00	99.27	1.01	
							Terbayarnya Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	130	35,231,000.00	130	100.00	35,231,000.00	100.00	1.00	
5	02	04	2.0 1	11		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah	1,142	154,647,176.00	985	86.25	130,449,106.00	84.35	1.02	
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Terbayarnya Cetak Sertifikat (Lbr)	71	2,485,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
							Terbayarnya Cetak Spanduk/Banner (Mtr)	75	7,500,000.00	75	100.00	7,500,000.00	100.00	0.00	
							Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat	562	14,050,000.00	540	96.09	13,350,000.00	95.02	1.01	
							Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Harian (242 Hari)	12	13,100,000.00	10	83.33	9,900,000.00	75.57	1.10	
							Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	28,800.00	12	100.00	28,800.00	100.00	1.00	
							Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	36,000.00	12	100.00	36,000.00	100.00	1.00	
							Terbayarnya Perjalanan Dinas Biasa (OH)	36	46,299,000.00	36	100.00	46,271,274.00	99.94	1.00	
							Terbayarnya Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	362	71,148,376.00	300	82.87	53,363,032.00	75.00	1.10	
5	02	04	2.0 1	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pemeriksaan Pajak Daerah	1,109	215,427,005.00	1,049	94.59	193,988,953.00	90.05	1.05	

						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Lembar)		Penggandaan HVS (19 Lembar)	19	6,270.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Terbayarnya Cetak Spanduk/Banner (224 Mtr)	224	22,400,000.00	224	100.00	22,400,000.00	100.00	0.00	
								Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	515	22,145,000.00	513	99.61	22,102,000.00	99.81	0.00	
								Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Org/ jam)	14	13,400,000.00	4	28.57	900,000.00	6.72	0.00	
								Terbayarnya Jasa Tenaga Administrasi Harian 1 Org (242 Hari)	12	13,100,000.00	12	100.00	11,950,000.00	91.22	1.10	
								Terbayarnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	28,800.00	12	100.00	28,800.00	100.00	1.00	
								Terbayarnya Jaminan Kematian (JKM) bagi Non ASN (Org/Bln)	12	39,000.00	12	100.00	36,000.00	92.31	1.08	
								Terbayarnya Perjalanan Dinas Biasa (OH)	45	82,364,750.00	45	100.00	82,364,750.00	100.00	1.00	
								Terbayarnya Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	256	61,943,185.00	227	88.67	54,207,403.00	87.51	1.01	
5	02	04	201	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Potensi Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		670	259,623,155.00	670	100.00	258,299,228.00	99.49	1.01	

LKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala 2023

								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Lembar)	81	27,009,354.00	81	100.00	26,660,340.00	98.71	1.01	
								Terbayarnya Makanan dan Minuman Rapat (Porsi)	242	10,406,000.00	242	100.00	9,772,500.00	93.91	1.06	
								Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (Org/kali)	7	6,100,000.00	7	100.00	6,100,000.00	100.00	1.00	
								Terbayarnya Perjalanan Dinas Biasa (OH)	75	142,403,000.00	75	100.00	142,097,328.00	99.79	1.00	
								Terbayarnya Perjalanan Dinas Dalam Kota (OH)	265	73,704,801.00	265	100.00	73,669,060.00	99.95	1.00	
							JUMLAH BELANJA LANGSUNG		21,589	2,489,704,144	20,945	97.02	2,374,148,443	95.36	1.02	
							JUMLAH BELANJA (total)		21,601	6,747,425,281	20,957	97.02	6,120,610,810	90.71	1.07	

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Tahun
Renstra

NO	U R A I A N	2019		PROSENTASE	2020		PROSENTASE	2021		PROSENTASE	2022		PROSENTASE	2023		PROSENTASE
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1.	PAJAK HOTEL	60,388,335.00	99,810,927.00	165.28	16,740,000.00	28,575,566.00	170.70	60,000,000.00	86,140,212.00	143.57	60,000,000.00	60,892,176.00	101.49	60.000.000,00	66.119.705,00	110,20
2.	PAJAK RESTORAN	729,070,750.00	1,595,060,797.00	218.78	334,201,875.00	1,358,139,910.00	406.38	960,000,000.00	2,092,828,647.00	218.00	1,750,000,000.00	1,870,246,330.00	106.87	1.500.000.000,00	2.378.877.305,00	158,59
3.	PAJAK HIBURAN	3,000,000.00	11,650,000.00	388.33	2,650,000.00	2,650,000.00	100.00	1,323,000.00	8,027,667.00	606.78	75,000,000.00	62,820,957.00	83.76	60.000.000,00	27.557.053,00	45,93
4.	PAJAK REKLAME	326,500,000.00	365,919,750.00	112.07	104,037,500.00	201,965,025.00	194.13	256,500,000.00	143,496,317.00	55.94	56,000,000.00	82,550,100.00	147.41	40.000.000,00	153.976.725,00	384,94
5.	PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM	11,000,000,000.00	11,873,326,367.00	107.94	9,576,250,000.00	11,489,569,897.00	119.98	10,600,000,000.00	11,996,613,236.00	113.18	14,390,000,000.00	14,465,534,316.00	100.52	14.000.000.000,00	15.290.068.293,00	109,21
6.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN LAINNYA	363,318,000.00	713,779,856.00	196.46	355,029,031.00	881,130,001.99	248.19	415,000,000.00	380,981,020.00	91.80	24,259,000.00	24,775,250.00	102.13	-	-	-
7.	PAJAK PARKIR	-	-	-	-	-	-	10,000,000.00	10,706,600.00	107.07	35,000,000.00	40,145,800.00	114.70	35.000.000,00	46.526.600,00	132.93
8.	PAJAK AIR TANAH	-	-	-	-	-	-	500,000.00	500,000.00	100.00	45,000,000.00	48,130,000.00	106.96	-	-	-
9.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	360,000.00	16,770,000.00	4,658.33	16,000,000.00	72,512,500.00	453.20	65,000,000.00	57,240,000.00	88.06	3,500,000,000.00	3,442,384,488.00	98.35	45.000.000,00	47.915.000,00	106,48
10.	PBB-P2	2,700,000,000.00	3,201,453,225.00	118.57	1,108,187,500.00	3,032,451,647.00	273.64	2,350,000,000.00	3,618,338,305.00	153.97	-	-	-	3.500.000.000,00	3.358.309.537,00	95,95
11.	BPHTB	7,000,000,000.00	14,519,565,979.00	207.42	4,000,000,000.00	6,016,491,555.00	150.41	11,100,998,000.00	12,892,338,782.00	116.14	5,800,000,000.00	5,210,526,146.00	89.84	7.000.000.000,00	7.584.324.014,00	108,35
12.	RETRIBUSI DAERAH	4,196,426,028.00	4,157,497,278.72	99.07	3,813,752,515.00	3,889,140,784.00	101.98	1,227,630,365.00	1,017,885,296.00	82.91	7,500,000.00	51,954,000.00	692.72	7.500.000,00	4.910.000,00	65,47
JUMLAH		26,379,063,113.00	36,554,834,179.72	138.58	19,326,848,421.00	26,972,626,885.99	139.56	27,046,951,365.00	32,305,096,082.00	119.44	25,742,759,000.00	25,359,959,563.00	98.51	26.247.500.000,00	28.958.584.232,00	110,33

LKIP Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala 2023



PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUJIYAT, S.Sn., M.Pd
Jabatan : Pj. BUPATI BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua
Pj. BUPATI BARITO KUALA

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUS DAERAH**

MUJIYAT, S.Sn., M.Pd

Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
NIP. 19631107 199303 1 002

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Nilai Penerimaan Pajak Daerah	26.240.000.000	5.248.000.000	6.560.000.000	9.184.000.000	5.248.000.000
		Nilai Penerimaan Retribusi Daerah	7.500.000	1.500.000	1.875.000	2.625.000	1.500.000
2	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BPPRD	Nilai Evaluasi SAKIP BPPRD	75	-	-	-	75

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

MUJIYAT, S.Sn., M.Pd

Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
NIP, 19631107 199303 1 002



PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MUJIYAT, S.Sn., M.Pd
Jabatan : Pj. BUPATI BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua
Pj. BUPATI BARITO KUALA

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUS DAERAH**

MUJIYAT, S.Sn., M.Pd

Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
NIP. 19631107 199303 1 002

Program	Anggaran	Keterangan
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 292.860.048,00	APBD Kabupaten
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 116.391.925,00	APBD Kabupaten
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 160.443.600,00	APBD Kabupaten
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 215.427.005,00	APBD Kabupaten
Penagihan Pajak Daerah	Rp. 154.647.176,00	APBD Kabupaten
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp. 259.623.155,00	APBD Kabupaten
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 4.257.721.137,00	APBD Kabupaten
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 46.288.800,00	APBD Kabupaten
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 65.812.450,00	APBD Kabupaten
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 777.731.710,00	APBD Kabupaten
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 225.040.275,00	APBD Kabupaten
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 175.438.000,00	APBD Kabupaten
Total	Rp. 6.747.425.281,00	-



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEBBY WULANDARI, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KAB. BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
NIP. 19631107 199003 1 002

DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Meningkatnya Pengembangan Potensi dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Peningkatan Potensi Objek Pajak Daerah Persentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	%	20	30	25	25

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
NIP. 19631107 199303 1 002

DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASRUDDIN, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEBBY WULANDARI, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001

MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	WP	165	275	385	275

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001

MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI SAPUTRI, SE
Jabatan : ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MASRUDDIN, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021

DEWI SAPUTRI, SE
NIP. 19870706 2022032003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	WP	165	275	385	275

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021

DEWI SAPUTRI, SE
NIP. 19870706 2022032003



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAYANG SEGARAN PRATAMA, S.Ak.
Jabatan : AHLI PERTAMA – PENILAI PEMERINTAH
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MASRUDDIN, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021

MAYANG SEGARAN PRATAMA, S.Ak.
NIP. 19961016 2022032009

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	WP	165	275	385	275

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

MASRUDDIN, S.Sos
NIP. 19760820 200701 1 021

MAYANG SEGARAN PRATAMA, S.Ak.
NIP. 19961016 2022032009

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : VIVI RISMALianti, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DEBBY WULANDARI, S.STP
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001

VIVI RISMALianti, S.Sos
NIP. 19851013 201503 2 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Tersedianya Layannan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	WP	247	413	577	413

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DEBBY WULANDARI, S.STP
NIP. 19851125 200412 2 001

VIVI RISMALIANI, S.Sos
NIP. 19851013 201503 2 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBINAAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KAB. BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
NIP. 19631107 199303 1 002

ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Meningkatnya Penagihan dan Pemeriksaan	Persentase Peningkatan Pembayaran Piutang Pajak Daerah Persentase Wajib Pajak Daerah yang taat pasca Pembinaan dan Pemeriksaan	%	15	25	35	25

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
NIP. 19631107 199303 1 002

ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARIS NOPAL, SE
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBINAAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001

HARIS NOPAL, SE
NIP. 19820526 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Rp	3.936.000.000	6.560.000.000	9.184.000.000	6.560.000.000

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001

HARIS NOPAL, SE
NIP. 19820526 201001 1 012



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZHAR MI'RAJUDDIN, ST
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
Jabatan : KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PEMBINAAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001

AZHAR MI'RAJUDDIN, ST
NIP. 19740814 199503 1 004

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dibina dan diperiksa	WP / WR	15	40	30	15

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ENDANG TRIUJIANA, S.Si, ME
NIP. 19711208 199201 1 001

AZHAR MI'RAJUDDIN, ST
NIP. 19740814 199503 1 004



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AKHMAD HIDAYAT, SE
Jabatan : ANALIS PEMERIKSAAN PAJAK
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AZHAR MI'RAJUDDIN, ST
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

AZHAR MI'RAJUDDIN, ST
NIP. 19740814 199503 1 004

AKHMAD HIDAYAT, SE
NIP. 19850217 200501 1 001

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PEMERIKSAAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dibina dan diperiksa	WP / WR	15	40	30	15

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

AZHAR MI'RAJUDDIN, ST
NIP. 19740814 199503 1 004

AKHMAD HIDAYAT, SE
NIP. 19850217 200501 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALI AKBAR, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KAB. BARITO KUALA
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
NIP. 19631107 199303 1 002

ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Meningkatnya Kualitas Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian	Persentase Penyampaian Laporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang Benar dan Tepat Waktu Persentase Penyampaian Laporan evaluasi dan pengendalian yang Benar dan Tepat Waktu	%	25	25	25	25

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ir. H. GUSTI ROSA SYAHRUM
NIP. 19631107 199303 1 002

ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HILDANI AMRULLAH, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ALI AKBAR, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006

HILDANI AMRULLAH, S.Sos
NIP. 19750506 200604 1 005

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	3	5	8	8

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006

HILDANI AMRULLAH, S.Sos
NIP. 19750506 200604 1 005



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI MURDIANAH, M.Ak.
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ALI AKBAR, SE
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006

SRI MURDIANAH, M.Ak.
NIP. 19780623 200501 2 011

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	3	9	12	12

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

ALI AKBAR, SE
NIP. 19770510 199803 1 006

SRI MURDIANA, M.Ak.
NIP. 19780623 200501 2 011



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TATIK NOR AINA, SE
Jabatan : ANALIS MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HILDANI AMRULLAH, S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

HILDANI AMRULLAH, S.Sos
NIP. 19750506 200604 1 005

TATIK NOR AINA, SE
NIP. 19831204 200904 2 007

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	3	5	8	8

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

HILDANI AMRULLAH, S.Sos
NIP. 19750506 200604 1 005

TATIK NOR AINA, SE
NIP. 19831204 200904 2 007



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MARIANA, S.Kom
Jabatan : ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI MURDIANAH, M.Ak.
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SRI MURDIANAH, M.Ak.
NIP. 19780623 200501 2 011

MARIANA, S.Kom
NIP. 19830227 200604 2 010

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	3	9	12	12

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SRI MURDIANA, M.Ak.
NIP. 19780623 200501 2 011

MARIANA, S.Kom
NIP. 19830227 200604 2 010



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SALMAN FARISI
Jabatan : PENGADMINISTRASI PAJAK
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI MURDIANAH, M.Ak.
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SRI MURDIANAH, M.Ak.
NIP. 19780623 200501 2 011

SALMAN FARISI
NIP. 19650209 198903 1 017

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	3	9	12	12

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SRI MURDIANAH, M.Ak.
NIP. 19780623 200501 2 011

SALMAN FARISI
NIP. 19650209 198903 1 017



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NORLINA, A.Md
Jabatan : PRANATA KOMPUTER PELAKSANA
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI MURDIANAH, M.Ak.
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam pemberian penghargaan dan sanksi.

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SRI MURDIANAH, M.Ak.
NIP. 19780623 200501 2 011

NORLINA, A.Md
NIP. 19840717 200904 2 003

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET			
				TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV
1	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	3	9	12	12

Marabahan, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

SRI MURDIANAH, M.Ak.
NIP. 19780623 200501 2 011

NORLINA, A.Md
NIP. 19840717 200904 2 003

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM BADAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dahtiar Fajar, S.STP,M.Si	Kepala Badan	Penanggung Jawab	
2	Muhammad Arsyad, MP	Sekretaris	Sekretaris	
3	Ruswati, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset	Anggota	
4	Debby Wulandari, S.STP	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan		
5	Endang Triujiana, S.si, ME	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	Anggota	
6	Debby Wulandari, S.STP	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelayanan	Anggota	
7	Ali Akbar, SE	Kepala Bidang Pengendalian	Anggota	
8	Arini Nurlaila Sari, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
9	Masruddin, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pengembangan	Anggota	
10	Vivi Rismalianti, S.Sos	Kepala Sub Bidang Pelayanan	Anggota	
11	Akhmad Hidayat, SE	Plt. Kepala Sub Bidang Penagihan	Anggota	
12	Azhar Mi'rajuddin, ST	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan	Anggota	
13	Mariana, S.Kom	Plt. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian	Anggota	

KEPALA BADAN

Dahtiar Fajar, S.STP,M.Si
NIP. 19760519 199703 1 007